



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 5 Tahun 2024 6035-6046

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Seberapa Kuat Pajak Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Menggoyahkan Kemiskinan Di Provinsi Aceh?

Rollis Juliansyah^{1✉}, Jul Fahmi Salim²

(1) Universitas Teuku Umar, Aceh Barat, Indonesia, (2) Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Hukum Administrasi Negara LAN RI

Email: rollisjuliansyah@utu.ac.id^{1✉}

Abstrak

Kemiskinan merupakan kondisi ekonomi yang banyak dihadapi masyarakat terutama berpenghasilan rendah di berbagai wilayah. Keterkaitan kemiskinan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi refleksi secara kuantitatif dalam mengukur kondisi ekonomi secara agregat. Adanya instrumen pendapatan pemerintah seperti pajak digadang-gadangkan menjadi salah satu alternatif dalam pengurangan ketimpangan melalui pembiayaan kegiatan pemerintah di daerah. Berangkat dari hal ini kami menggali bagaimanakah pengaruh pajak daerah dan pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh dengan data runtut waktu tahun 2015 sampai dengan 2021. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan model regresi data panel. Data yang digunakan berupa data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan. Dari hasil penelitian yang kami lakukan mendapati hasil bahwa, pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh, sementara pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif serta signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Rekomendasi dari penelitian kami berpandangan bahwa; adanya program peningkatan pendapatan masyarakat guna mendorong kesejahteraan, hingga berdampak pada daya beli dan menekan kesenjangan sosial dan pengentasan kemiskinan wilayah.

Kata Kunci: *Kemiskinan, Pajak Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Provinsi Aceh*

Abstract

Poverty is an economic condition that many people face, especially low-income people in various regions. Relationships between poverty and economic growth are a quantitative reflection in measuring aggregate economic conditions. The existence of government revenue instruments such as taxes is predicted to be one of the alternatives in reducing inequality through financing government activities in the regions. Departing from this, we explore how the influence of local taxes and economic growth on poverty in Aceh Province. From 2015 to 2021, the data. A panel-based regression model is the quantitative research methodology that was used. Secondary information from the Ministry of Finance's Directorate General of Fiscal Balance and the National Bureau of Statistics (BPS) was used. From the results of our research, we found that local taxes have no effect on poverty in Aceh Province, but economic growth is negatively and significantly related to poverty in Aceh Province. Recommendations from our research are of the view that; there is a program to increase community income to encourage welfare, to have an impact on purchasing power and reduce social inequality and poverty alleviation in the region.

Keyword: *Poverty, Local Tax, Economic Growth, Aceh Province*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan klasik yang menjadi banyak dibahas dikalangan pengambil kebijakan dan dari kalangan akademisi dalam mencari solusi dan determinan dalam terjadinya kemiskinan (Sabrina, 2022); (Sullivan & Hickel, 2023) (Malerba et al., 2021). Terutama dalam dunia yang mengalami pertumbuhan populasi lebih tinggi dibanding dibandingkan pertumbuhan ekonomi, hal ini berdampak pada kemiskinan yang dipengaruhi dalam jangka panjang pada kemiskinan ekstrim. Alokasi pembangunan dari pemerintah dalam pengentasi kemiskinan salah satunya diharapkan dari pajak (Rahman et al., 2022); (Aničić et al., 2016); (Sotomayor, 2021). Kemiskinan ini sendiri dapat berupa dari kemsanggupan finansial perkapita atau per orang dalam mendapatkan kemampuan dasar atau kebutuhan primer. Hal ini berdampak pada pertumbuhan melalui salahsatunya minat beli masyarakat dalam konsumsi barang dan jasa, sehingga rendahnya pendapatan masyarakat membuat proses pertumbuhan dan pajak menjadi lesu dan kinerja menjadi kurang produktif dalam melakukan produksi dari sisi supplay barang dan jasa (Aničić et al., 2016); (Syahidin et al., 2022).

Kemiskinan merupakan masalah yang pelik dalam kehidupan. Berbicara program pengentasan kemiskinan sudah ada dari dahulu hingga era modern yangmana isu pembangunan berkelanjutan (Barbier, 2010); (Hasan et al., 2022) salah satunya memuat agenda pengentasan kemiskinan yang diusung oleh Bank Dunia era 60-an silam. *Milenium*

Development Goals sampai *Sustainable Development Goals* pun memuat program kesejahteraan dan kemiskinan yang terdapat dalam 169 indikator. Kemiskinan diakibatkan oleh ketiadmampuan finansial saja, anamun diakibatkan oleh multidimensi permasalahan sosial lainnya (Robles Aguilar & Sumner, 2020) dan juga dipengaruhi salah satunya oleh kebijakan dan kelembagaan (Charlier et al., 2021).

Era modern ini pengukuran kemiskinan dapat dilakukan dari banyak sudut pandang maupun indikator, baik dari keparahan dan kedalaman kemiskinan (P1 dan P2) maupun dengan menggunakan tingkat pajak yang diterima oleh pemerintah yang diperoleh oleh masyarakat dan kembali kepada masyarakat dalam bentuk tidak langsung. Tak hanya itu saja pengukuran kemiskinan juga dapat ditinjau dengan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Dalam pengentasan kemiskinan berbagai program dilakukan baik kegiatan bersifat langsung pada masyarakat maupun tidak (Ouoba & Sawadogo, 2022); (Rönkkö et al., 2022) ada berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) hingga bantuan sosial lainnya bagi masyarakat miskin (Prasetyoningrum, 2018) (Kansiime et al., 2021). Banyak daerah kelabakan adanya Covid19 lalu memperburuk kondisi potret kesejahteraan masyarakat, sehingga banyak wilayah diberbagai daerah dalam mencapai kesejahteraan dan pertumbuhan (Megondaru & Hasmarini, 2022).

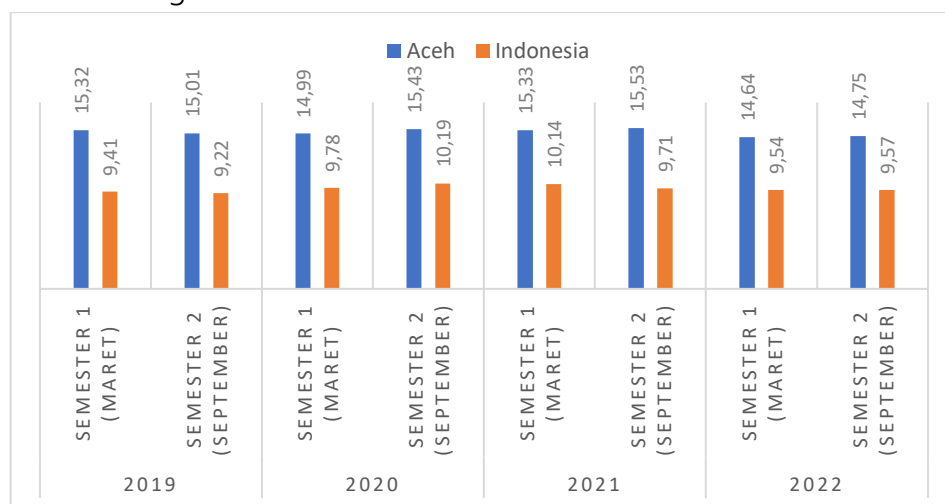
Berbicara soal kemiskinan, tentu ada keteraitan dengan pertumbuhan ekonomi, yang dapat menjadi sebagai cerminan atau refleksi dalam menakar tingkat kesejahteraan. Pada dewasa ini, Indonesia mendapati pertumbuhan Produk Domestik Bruto pada triwulan I tahun 2023 sebesar 5.03 persen. Hal ini tentunya lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2022 triwulan ke III sebesar 5,78 persen.

Jika ditinjau tingkat kemiskinan di daerah, seperti Aceh yang menjadi fokus dalam penelitian ini, merupakan salah satu daerah yang dilatar belakanginya konflik dan Tsunami 2004 silam hingga membuat wilayah Aceh mendapatkan otonomi khusus hingga berbagai hibah dari dalam hingga luar negeri. Hal ini seperti kegiatan Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar, Serambi (2023) yang bertujuan untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan serta kesenjangan antardaerah melalui penguatan efisiensi dan efektivitas kebijakan dan tata kelola desentralisasi, secara umum guna pengentasan kemiskinan.

Isu kemiskinan di Aceh menjadi transeter di kalangan pengamat pembangunan dan pemerhati. Adanya dana otonomi khusus belum mampu menjawab tantangan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan kesejahteraan sehingga berdampak pada akumulatif penduduk miskin di Aceh (Detik, 2021). Pada kesempatan berbeda di laman

retizen.republika (2021) merilis Aceh masuk dalam kategori provinsi termiskin ke 5 di Pulau Sumatera, dimana pada periode tersebut jumlah masyarakat miskin meningkat 15,33 persen menjadi 15,53 persen. Menurut data yang dirilis oleh BPS (2023) kemiskinan yang terjadi di Indonesia menurut wilayah cenderung berfluktuasi dan berubah-ubah dalam kurun waktu 6 bulan terakhir, seperti halnya di Provinsi Aceh. Persentase kemiskinan di Aceh lebih tinggi dibanding tingkat persentase kemiskinan Nasional. Dalam kurun waktu 2019 sampai 2022 (september) memperlihatkan adanya kenaikan persentase penduduk miskin, meskipun sempat turun di beberapa waktu, seperti tahun 2021 di semester 2 (September) turun sebesar 0.1 persen dan kembali meningkat.

Pada tahun 2022 semester 1 (Maret) persentase masyarakat miskin menurun, tidak seperti sebelumnya. Hal ini ditandai dengan adanya kesejahteraan yang diperoleh masyarakat yang tercermin dari penurunan angka kemiskinan. Adanya lonjakan harga-harga yang diakibatkan oleh naiknya harga bahan bakar memungkinkan tahun 2022 meningkatkan pertumbuhan masyarakat miskin di Aceh. Seperti halnya yang kami sajikan dalam gambar berikut, Persentase kemiskinan di Provinsi Aceh dan perbandingannya dengan kemiskinan di tingkat Nasional.



Sumber: BPS, 2023 (data diolah)

Gambar 1. Persentase kemiskinan di Provinsi Aceh dan Indonesia 2019-2022

Adanya pajak yang diterima pemerintah yang dihitung secara agregad memungkinkan penurunan kemiskinan. Sementara pertanyaan-pertanyaan muncul berupa, bagaimanakah pertumbuhan ekonomi terjadi dan penurunan persentase masyarakat miskin bertambah, sehingga kemampuan peningkatan pendapatan perkapita tidak terjadi, apakah memungkinkan terjadinya penurunan masyarakat miskin melalui pajak daerah?

Dari uraian-uraian fenomena dan problema yang sudah dikemukakan membawa kami mengurai secara kualitatif atas permasalahan yang fundamental tersebut

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menggunakan data yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) dan Badan Pusat Statistik (BPS) dari tahun 2015 sampai 2021. Pemilihan model pengolahan kami lakukan dengan metode regresi data panel, yang kami anggap dapat memberikan kemudahan dalam mengestimasi pengujian secara statistik, sehingga memudahkan dalam proses analisis maupun pemilahan bauran data. Untuk jenis data yakni pajak daerah di 23 kab/kota yang ada di Aceh; persentase kemiskinan dan Produk Domestik Regional Bruto.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil regresi data panel yang telah dilakukan menunjukkan bagaimana pengaruh pajak daerah, pertumbuhan ekonomi terhadap kemiskinan di provinsi Aceh tahun 2015 sampai dengan 2021.

Pemilihan Mode Terbaik

Dalam regresi data panel, diperlukan langkah-langkah pemilihan model terbaik yang akan digunakan untuk menganalisis dan di interpretasikan. Pertama dilakukan uji Chow untuk memilih model mana yang terbaik antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM). Selanjutnya dilakukan Uji Hausman untuk memilih model terbaik antara Fixed Effect Model atau Random Effect Model. Jika hasil Uji Chow dan Hausmant tidak konsisten maka dilanjutkan dengan melakukan uji Lagrange Multiplier, untuk memilih antara Random Effect Model atau Common Effect Model.

a. Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan model terbaik antara Common Effect Model dan Fixed Effect Model.

Tabel 1. Hasil Uji Chow

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	18.493816	(22,136)	0.0000

Sumber: output pengolahan penulis

H0 : Model CEM terpilih

H1 : Model FEM terpilih

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. F sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H0 ditolak, artinya model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

b. Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara Fixed Effect Model dan Random Effect Model.

Tabel 2. Uji Hausmen

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	8.032068	2	0.0180

Sumber: output pengolahan penulis

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. F sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H0 ditolak, artinya model terbaik adalah *Fixed Effect Model*.

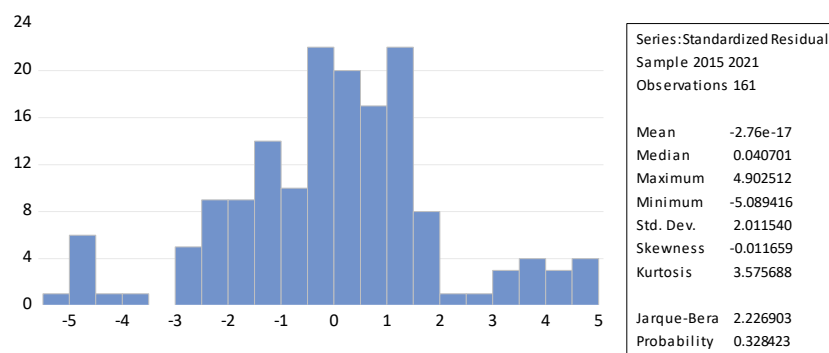
H0 : Model REM terpilih

H1 : Model FEM terpilih

Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Untuk uji normalitas data digunakan metode Jarque Berra (JB), dimana suatu data penelitian dikatakan normal jika nilai prob. JB $> 0,05$. Dari hasil uji di atas dapat dilihat bahwa nilai Prob. JB sebesar $0,3284 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa residual terdistribusi normal.



Gambar 2. Histogram Normalitas

Sumber: output pengolahan penulis

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk melihat hubungan atau korelasi antar variabel independen. Suatu permodelan penelitian yang baik tidak memiliki korelasi yang tinggi.

Tabel 3. Hasil Pengujian Multikolinearitas

	PAJAK	PDRB
PAJAK	1.000000	0.458158
PDRB	0.458158	1.000000

Sumber: output pengolahan penulis

Dari hasil pengujian tersebut dapat dilihat bahwa nilai uji korelasi antara variabel independen dalam hal ini variabel pajak dan PDRB tidak memiliki nilai korelasi yang tinggi, masi berada di bawah 0,7 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam varibel penelitian.

c. Fixed Effect Model.

Tabel 4. Hasil Pengolahan Menggunakan Model Fixed Effect Model

Variable	Coefficien			
	t	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PAJAK	2.86E-12	1.67E-11	0.170767	0.8647
PDRB	-3.97E-07	6.55E-08	-6.049810	0.0000
C	18.52310	0.494132	37.48612	0.0000
Weighted Statistics				
Root MSE	2.005283	R-squared	0.773966	
Mean dependent var	22.04258	Adjusted R-squared	0.734077	
S.D. dependent var	11.60259	S.E. of regression	2.181821	
Sum squared resid	647.4067	F-statistic	19.40328	
Durbin-Watson stat	1.378320	Prob(F-statistic)	0	
Unweighted Statistics				
R-squared	0.695988	Mean dependent var	16.46478	
Sum squared resid	659.2779	Durbin-Watson stat	1.336386	

Sumber: output pengolahan penulis

Setelah dilakukan pengujian kami mendapati nilai koefisien variabel pajak daerah sebesar 0,000000000003 dan nilai probabilitasnya sebesar 0,8640, nilai probabilitasnya > dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh signifikan

terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Hasil pengujian menunjukkan nilai koefisien variabel PDRB daerah sebesar $-0,000039700000$ dan nilai probabilitasnya sebesar $0,000$, nilai probabilitasnya $<$ dari $0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel PDRB berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

Dari hasil penelitian didapat hasil pengujian F-Stat. Sebesar 19.40328 dan nilai Prob. F sebesar $0,0000$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pajak daerah dan PDRB secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh.

a. Pengaruh Pajak Daerah terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di 23 Kabupaten/Kota Provinsi Aceh dalam rentang waktu tahun 2015 sampai 2021 menunjukkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Ini menunjukkan meskipun Pajak Daerah di Provinsi Aceh terus mengalami kenaikan, tidak memiliki kontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hal ini selain berdampak pada penerimaan daerah, juga mengakibatkan proses produksi berupa suplai barang ke pasar menjadi menurun.

Hasil ini tidak berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Maskaeva et al., (2022) yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang efek positif pajak mampu menurunkan indikator kemiskinan di Tanzania. Hasil yang berbeda didapatkan oleh (Frank Kordzo Adukonu & Ofori-Abebrese, 2016); (Malerba et al., 2021) yang menemukan bahwa peningkatan pajak secara tidak langsung memperburuk tingkat kemiskinan di Ghana.

b. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Aceh

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh. Ini menandakan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Aceh akan berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlando et al., (2020); (Barro & Sala-i-Martin, 1995); (Sullivan & Hickel, 2023) yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi berdampak negatif terhadap tingkat kemiskinan. Hasil penelitian ini juga di dukung oleh penelitian lainnya menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi secara substansial berdampak terhadap kemiskinan (Korankye et al., 2021). Tidak hanya di Indonesia, studi kasus di India jua memiliki hasil yang sama yaitu pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kemiskinan dalam jangka pendek (Alam & Alam, 2021). Di Nigeria juga terdapat hubungan yang signifikan antara kemiskinan, pengangguran, tingkat kematian, konsumsi dan PDB (Obianuju Emmanuela & Tonna David, 2018).

Meskipun beberapa penelitian sejalan dengan hasil yang ditemukan dalam penelitian ini, namun hasil berbeda didapatkan oleh Purbaningsih, (2021) yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap penurunan kemiskinan.

SIMPULAN

Kami menyimpulkan bahwa pajak daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Aceh, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di 23 Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Sehingga kami menyarankan agar kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan per kapita dengan tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia yang baik dan produktivitas perlu diperhatikan guna mendukung tingkat pendapatan yang memiliki implikasi bagi pengurangan kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Aceh.

Langkah selanjutnya perlu diperhatikan bahwa menambahkan variabel seperti pengurangan dan kemiskinan di perkotaan dan di perdesaan untuk lebih memperjelas kesenjangan kesejahteraan

DAFTAR PUSTAKA

- Aničić, J., Jelić, M., & Đurović, J. M. (2016). Local Tax Policy in the Function of Development of Municipalities in Serbia. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 221, 262–269. <https://doi.org/10.1016/J.SBSPRO.2016.05.114>
- Alam, Md. Q., & Alam, Md. S. (2021). Financial Development, Economic Growth and Poverty Reduction in India: An Empirical Evidence. *ETIKONOMI*, 20(1), 13–22. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.18417>
- Barbier, E. B. (2010). Poverty, development, and environment. *Environment and Development Economics*. <https://doi.org/10.1017/S1355770X1000032X>
- Barro, R. J., & Sala-i-Martin, X. (1995). Economic Growth. In *European psychiatry the journal of the Association of European Psychiatrists*. [https://doi.org/10.1016/S0164-0704\(96\)80041-3](https://doi.org/10.1016/S0164-0704(96)80041-3)
- Charlier, D., Legendre, B., & Ricci, O. (2021). Measuring fuel poverty in tropical territories: A latent class model. *World Development*, 140, 105278. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105278>
- Erlando, A., Riyanto, F. D., & Masakazu, S. (2020). Financial inclusion, economic growth, and poverty alleviation: evidence from eastern Indonesia. *Heliyon*, 6(10).

<https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05235>

- Fauzi, A. (2021). Reformasi Pajak Daerah di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Kebijakan Pajak*, 22(1), 10–20.
- Frank Kordzo Adukonu, S. E., & Ofori-Abebrese, G. (2016). Relative Impact of Various Taxes on Poverty in Ghana. *Mediterranean Journal of Social Sciences*. <https://doi.org/10.5901/mjss.2016.v7n3p150>
- Hasan, M., Hartoto, H., Abdelina, A., Riyaldi, M. H., Aswanto, A., Akbar, T., Juliansyah, R., Talakua, B. A., Firmansyah, H., Nugroho, H., Ferdinandus, A. Y., Sattar, S., Apriyeni, D., & Nugroho, L. (2022). Ekonomi Pembangunan Sebuah Tinjauan Teori Dan Praktis. In R. Septiani (Ed.), *Cv Widina Media Utama*. Cv Widina Media Utama.
- Kansiime, M. K., Tambo, J. A., Mugambi, I., Bundi, M., Kara, A., & Owuor, C. (2021). COVID-19 implications on household income and food security in Kenya and Uganda: Findings from a rapid assessment. *World Development*, 137. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105199>
- Korankye, B., Wen, Z., Appiah, M., & Antwi, L. (2021). The Nexus Between Financial Development, Economic Growth and Poverty Alleviation: PMG-ARDL Estimation. *ETIKONOMI*, 20(1), 1–12. <https://doi.org/10.15408/etk.v20i1.15908>
- Maskaeva, A., Bochkaeva, Z., Mmasa, J., & Msafiri, M. (2022). The impact of indirect tax on income distribution and poverty in Tanzania. *Annals of Public and Cooperative Economics*, 93(1), 103–128. <https://doi.org/10.1111/apce.12319>
- Malerba, D., Gaentzsch, A., & Ward, H. (2021). Mitigating poverty: The patterns of multiple carbon tax and recycling regimes for Peru. *Energy Policy*, 149, 111961. <https://doi.org/10.1016/J.ENPOL.2020.111961>
- Megondaru, B., & Hasmarini, I. (2022). Pengaruh Inflasi, Pengangguran, Modal Manusia, dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2020-2021. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 168–177. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.12379>
- Nasution, A. (2001). Pengantar Ilmu Ekonomi Makro. PT. Bumi Aksara.
- Obianuju Emmanuel, A., & Tonna David, E. (2018). Economic Growth and Poverty Reduction in Nigeria. *Sumerianz Journal of Economics and Finance*, 1(1).
- Ouoba, Y., & Sawadogo, N. (2022). Food security, poverty and household resilience to COVID-19 in Burkina Faso: Evidence from urban small traders' households. *World Development Perspectives*, 25, 100387. <https://doi.org/10.1016/J.WDP.2021.100387>
- Purbaningsih, Y. P. (2021). The effect of income distribution, human development index, and

economic growth on poverty. *International Journal of Economic and Business Applied*, 1(2), 187–194.

- Purnomo, H. (2018). Analisis Penerapan E-Planning dan E-Budgeting Terhadap Kinerja Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah di Jawa Tengah). *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Akuntansi Terapan*, 9(1), 10–18.
- Prasetyoningrum, A. K. (2018). Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia [Analysis of the Effect of the Human Development Index (HDI), Economic Growth, and Unemployment on Poverty in Indonesia]. *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah*, 6(2), 217.
- Rahman, A. G., Dai, S. I. S., & Santoso, I. R. (2022). Pengaruh Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Wilayah Sulawesi). *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(2), 64–74. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i2.9122>
- Robles Aguilar, G., & Sumner, A. (2020). Who are the world's poor? A new profile of global multidimensional poverty. *World Development*, 126, 104716. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2019.104716>
- Rönkkö, R., Rutherford, S., & Sen, K. (2022). The impact of the COVID-19 pandemic on the poor: Insights from the Hrishipara diaries. *World Development*, 149, 105689. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2021.105689>
- Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. *The Journal of Political Economy*, 1002–1037.
- Roser, M. (2021, March 15). How much economic growth is necessary to reduce global poverty substantially? Ourworldindata.Org.
- Sabrina, R. (2022). Strategi Pembangunan Berkelanjutan di Era Otonomi Daerah Berbasis Partisipasi Masyarakat. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 22(1), 53–61. <https://doi.org/10.30596/ekonomikawan.v22i1.10200>
- Sotomayor, O. J. (2021). Can the minimum wage reduce poverty and inequality in the developing world? Evidence from Brazil. *World Development*, 138, 105182. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2020.105182>
- Sullivan, D., & Hickel, J. (2023). Capitalism and extreme poverty: A global analysis of real wages, human height, and mortality since the long 16th century. *World Development*, 161, 106026. <https://doi.org/10.1016/J.WORLDDEV.2022.106026>
- Syahidin, S., Marsam, M., Sudirman, A., Juliansyah, R., Pinem, D., Rianti, T. S. M., Yusuf, M.,

Harahap, R. S. P., Yuningsih, E., Ariyanto, A., Nugroho, H., Widjiantoro, S. T., & Bakti, R. (2022). Pengantar Ekonomi Mikro . In M. Mukhtadi (Ed.), *Cv Widina Media Utama*. Cv Widina Media Utama.

Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.

Sjahdeni, S. , R. (2005). *Kemiskinan dan Pembangunan*. Refika Aditama.

Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. Methuen Publishing.

Soemantri, S. (2018). *Pajak Daerah: Teori dan Aplikasi*. Erlangga.

Soleh, A. (2013). *Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Review.

Solow, R. M. (1956). A Contribution to The Theory of Economic Growth. *The Quarterly Journal of Economics*, 65–94.